

ETIKA DAN KEPATUHAN DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA: TANTANGAN, IMPLEMENTASI, DAN SOLUSI DI INDONESIA

Shiva Nabila Salsabhila Umakaapa¹, Stela Anastasya Tiona Topolega², Rizky Dwi Putra³,
Nur Apriyani⁴

shvnbl1302@gmail.com¹, anastasyastela05@gmail.com², rizkydwiputra216@gmail.com³

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia YAPMI Makassar

ABSTRAK

Makalah ini mengkaji pentingnya etika dan kepatuhan dalam membentuk tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis dan berkeadilan di Indonesia. Etika, sebagai pedoman moral, dan kepatuhan, sebagai ketaatan terhadap hukum dan norma, saling melengkapi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan serius seperti korupsi, degradasi moral, ketimpangan sosial-ekonomi, dan kurangnya keteladanan pemimpin. Melalui analisis implementasi di sektor pemerintahan, penegakan hukum, pendidikan, dan partisipasi masyarakat, makalah ini merumuskan solusi komprehensif, meliputi penguatan pendidikan etika dan karakter, reformasi birokrasi, penguatan penegakan hukum, serta peningkatan keteladanan dari pemimpin. Diharapkan, sinergi upaya ini dapat menciptakan masyarakat yang berintegritas, demokratis, dan berkeadilan sosial.

Kata Kunci: Etika, Kepatuhan, Kehidupan Bernegara, Tantangan, Solusi, Indonesia.

ABSTRACT

This paper examines the importance of ethics and compliance in forming a harmonious and just national and state order in Indonesia. Ethics, as a moral guideline, and compliance, as obedience to laws and norms, complement each other to realize good governance. However, its implementation still faces serious challenges such as corruption, moral degradation, socio-economic inequality, and lack of exemplary leaders. Through an analysis of implementation in the government, law enforcement, education, and community participation sectors, this paper formulates a comprehensive solution, including strengthening ethics and character education, bureaucratic reform, strengthening law enforcement, and increasing exemplary leaders. It is hoped that the synergy of these efforts can create a society with integrity, democracy, and social justice.

Keywords: Ethics, Compliance, State Life, Challenges, Solutions, Indonesia.

PENDAHULUAN

Etika dan kepatuhan adalah dua pilar fundamental dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis dan berkeadilan. Etika menuntun perilaku moral warga negara, sementara kepatuhan merujuk pada ketaatan terhadap hukum, peraturan, dan norma yang berlaku. Keduanya esensial untuk penyelenggaraan negara yang tertib, adil, dan demokratis. Pentingnya penerapan norma etik secara berkesinambungan bagi Indonesia di tengah perkembangan dunia global untuk mewujudkan kehidupan bersama yang tenteram dan damai¹. Namun, realitas di Indonesia menunjukkan tantangan serius dalam implementasi etika dan kepatuhan, ditandai oleh fenomena korupsi, pelanggaran hukum, rendahnya kedisiplinan, dan melemahnya keteladanan pemimpin. Pengaruh globalisasi juga memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat, seringkali mengabaikan nilai-nilai moral dan hukum. Semakin majunya arus globalisasi dapat mengurangi rasa cinta tanah air dan

¹ Muhammad Mona Adha and Erwin Susanto, "Kekuatan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia," *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan* 15, no. 01 (2020): 121–38, <https://doi.org/10.37680/adabiya.v15i01.319>.

bangga terhadap budaya sendiri². Kondisi ini menyoroti perlunya penguatan nilai-nilai etika dan kepatuhan melalui pendidikan karakter, penegakan hukum yang adil, dan keteladanan pemimpin. Dengan demikian, kehidupan bernegara diharapkan dapat menuju integritas, demokrasi, dan keadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan fokus pada kajian literatur deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan analisis mendalam terhadap berbagai konsep, teori, dan temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan etika dan kepatuhan dalam konteks kehidupan bernegara di Indonesia. Sebagai sebuah kajian pustaka, penelitian ini secara sistematis menelusuri, mengidentifikasi, mengkaji, dan mensintesis informasi dari beragam sumber data sekunder.

Sumber data utama meliputi jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas etika, moralitas, kepatuhan hukum, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), isu korupsi, pendidikan karakter, serta partisipasi masyarakat. Selain itu, buku-buku referensi yang mencakup filsafat moral, ilmu politik, hukum tata negara, dan sosiologi juga dimanfaatkan. Laporan penelitian resmi dari lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, serta artikel berita dan opini yang kredibel, turut melengkapi data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi atau penelusuran literatur secara ekstensif. Proses ini dimulai dengan identifikasi kata kunci yang relevan, dilanjutkan dengan penelusuran pada basis data akademik daring dan perpustakaan digital.

Literatur yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan kriteria relevansi dan kredibilitas, dengan prioritas pada publikasi terbaru untuk memastikan aktualitas informasi. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan secara deskriptif-analitis. Tahapan analisis meliputi reduksi data untuk memilih informasi esensial, penyajian data melalui pengelompokan berdasarkan tema, serta interpretasi dan sintesis mendalam untuk membangun argumen yang koheren. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman komprehensif mengenai etika dan kepatuhan di Indonesia, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan berdasarkan sintesis literatur yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN ETIKA

Etika berasal dari bahasa Yunani "ethos" yang berarti kebiasaan, adat, atau karakter. Dalam filsafat, etika adalah cabang ilmu yang membahas nilai-nilai dan prinsip moral yang mengatur tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat³. Etika tidak hanya mengatur perilaku eksternal, tetapi juga menuntun kesadaran batin seseorang terhadap apa yang dianggap baik, benar, dan layak dilakukan. Oleh karena itu, etika menjadi dasar dalam pengambilan keputusan moral yang adil dan bertanggung jawab, baik dalam lingkup individu, sosial, maupun institusional. Dalam konteks kehidupan bernegara, etika berlaku pada hubungan antarindividu, hubungan warga negara dengan negara, serta hubungan antarlembaga negara. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan integritas menjadi fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan demokratis.

² Shipa Amalia Saputri Saputri and Fatma Ulfatun Najicha, "Peran Penting Pancasila Sebagai Sistem Etika Dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 240–46, <https://doi.org/10.31571/jpkn.v7i2.7650>.

³ Saputri and Najicha.

B. PENGERTIAN KEPATUHAN

Kepatuhan adalah tindakan atau sikap seseorang dalam menaati aturan, hukum, atau norma sosial yang berlaku dalam suatu sistem masyarakat atau negara⁴. Kepatuhan mencerminkan sejauh mana individu atau kelompok mematuhi standar hukum dan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas yang sah. Dalam perspektif sosiologis dan hukum, kepatuhan dianggap sebagai elemen penting dalam menciptakan keteraturan sosial dan menjamin keadilan hukum. Kepatuhan dapat bersifat normatif (berdasarkan kesadaran) atau koersif (karena pengaruh sanksi). Dalam negara demokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum, kepatuhan seharusnya lahir dari kesadaran moral, bukan semata-mata karena takut terhadap hukuman. Oleh karena itu, penting untuk menumbuhkan budaya hukum yang sehat, di mana warga negara dan penyelenggara negara sama-sama tunduk pada aturan yang berlaku.

C. HUBUNGAN ANTARA ETIKA DAN KEPATUHAN

Etika dan kepatuhan memiliki hubungan yang saling melengkapi. Etika berperan sebagai sumber nilai yang mendorong kesadaran internal seseorang untuk berperilaku sesuai norma kebaikan, sedangkan kepatuhan merupakan manifestasi nyata dari penerapan nilai-nilai tersebut dalam tindakan konkret. Dalam konteks bernegara, etika mendorong pengambilan keputusan yang adil dan bermoral, sementara kepatuhan memastikan bahwa keputusan tersebut diimplementasikan sesuai aturan hukum yang berlaku. Ketika etika dan kepatuhan berjalan beriringan, maka akan tercipta sistem sosial-politik yang adil, transparan, dan akuntabel. Sebaliknya, jika hanya kepatuhan yang ditegakkan tanpa landasan etika, maka hukum dapat menjadi alat kekuasaan yang represif. Jika hanya etika yang dijunjung tanpa kepatuhan hukum, maka tatanan sosial menjadi rentan terhadap pelanggaran dan ketidakteraturan.

D. URGENSI ETIKA DAN KEPATUHAN DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA

Dalam praktik kenegaraan, etika dan kepatuhan menjadi elemen utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Fenomena korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hukum di Indonesia menunjukkan bahwa krisis etika dan lemahnya kepatuhan masih menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, penguatan kedua nilai ini sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan demokratis. Etika dan kepatuhan juga berperan dalam mendukung supremasi hukum dan pelaksanaan hak-hak konstitusional warga negara. Dengan membudayakan nilai-nilai etika sejak dini melalui pendidikan serta memperkuat sistem penegakan hukum yang adil, maka bangsa Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan global dan menjaga stabilitas nasional dalam jangka panjang.

E. ETIKA DAN KEPATUHAN DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA BERDASARKAN PANCASILA

Dalam kehidupan bernegara, etika dan kepatuhan memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan. Keduanya saling melengkapi dalam menciptakan tatanan masyarakat yang bermartabat serta penyelenggaraan negara yang berdasarkan hukum dan prinsip moral. Etika menjadi acuan normatif dalam bersikap dan bertindak, sedangkan kepatuhan merupakan perwujudan konkret dari penghormatan terhadap sistem hukum dan peraturan yang berlaku. Tanpa etika, hukum akan kehilangan dimensi moralnya, dan tanpa kepatuhan,

⁴ Saputri and Najicha.

etika hanya akan menjadi konsep ideal yang tidak berdaya dalam praktik. Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai etis yang luhur, seperti kemanusiaan, keadilan, musyawarah, dan ketuhanan. Nilai-nilai ini seharusnya menjadi fondasi dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika Pancasila tidak hanya bersifat filosofis, tetapi juga praktis, karena menjadi acuan dalam pembentukan hukum, kebijakan publik, serta perilaku aparatur negara dan warga negara. Ketika nilai-nilai Pancasila diterapkan secara konsisten, maka kehidupan kenegaraan akan mencerminkan integritas, tanggung jawab sosial, dan keadilan substantif⁵. Implementasi nilai-nilai Pancasila juga mencerminkan bentuk kepatuhan terhadap konstitusi dan sistem hukum nasional. Kepatuhan tersebut tidak semata-mata diwujudkan dalam ketaatan hukum yang bersifat formal, tetapi juga dalam perilaku sosial yang mencerminkan kesadaran etis, seperti menghormati hak orang lain, menjunjung tinggi nilai demokrasi, dan menghindari penyimpangan kekuasaan. Dalam konteks ini, kepatuhan bukan sekadar tunduk kepada hukum, tetapi lebih dalam lagi merupakan komitmen untuk menjaga keharmonisan kehidupan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah disepakati secara kolektif.

F. IMPLEMENTASI ETIKA DAN KEPATUHAN DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA

Implementasi etika dan kepatuhan dalam kehidupan bernegara dapat diwujudkan melalui berbagai aspek penting:

1. Pemerintahan

Dalam konteks pemerintahan, implementasi etika dan kepatuhan merupakan fondasi utama bagi terciptanya tata kelola yang baik dan berintegritas. Hal ini diwujudkan melalui penerapan prinsip *good governance* yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, serta partisipasi masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan adil adalah landasan penting untuk memastikan keadilan, kesejahteraan, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah⁶. Transparansi dalam pemerintahan berarti bahwa proses pengambilan keputusan, kebijakan publik, serta pelaksanaan program dan anggaran harus dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat luas. Keterbukaan informasi ini penting untuk membangun iklim kepercayaan, mencegah spekulasi negatif, serta mengurangi ruang bagi tindakan manipulatif atau penyimpangan. Dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan transparansi sebagai salah satu wujud akuntabilitas⁷. Akuntabilitas mencakup tanggung jawab administratif (ketaatan pada prosedur dan regulasi) dan tanggung jawab moral (integritas dan etika dalam membuat keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat). Responsibilitas menekankan bahwa pemerintah tidak hanya bekerja sesuai peraturan, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap masyarakat. Partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam pembangunan negara kesejahteraan⁸. Partisipasi publik memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi, kritik, dan solusi terhadap persoalan

⁵ Saputri and Najicha.

⁶ Idah Rosidah et al., "Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey)," *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi : EMBA 2*, no. 1 (2023): 137–56, <https://doi.org/10.59820/emba.v2i1.110>.

⁷ Kennywan Leo Arischa and Aldri Frinaldi, "Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Dalam Penyajian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)," *Tanah Pilih 3*, no. 1 (2023): 11–18, <https://doi.org/10.30631/tpj.v3i1.1369>.

⁸ Mochamad Riyanto and Vitalina Kovalenko, "Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 5*, no. 2 (2023): 374–88, <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.374-388>.

kebijakan, menciptakan dialog sehat, memperkuat legitimasi kebijakan, dan menjamin kebijakan yang berpihak pada kepentingan kolektif. Penerapan prinsip good governance juga memiliki implikasi besar terhadap upaya pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah fondasi utama dalam menciptakan tatanan masyarakat yang adil, tertib, dan berkeadaban. Hukum sebagai instrumen pengatur perilaku warga negara serta hubungan antara negara dan rakyatnya. Keberhasilan dalam menegakkan hukum secara efektif dan berkeadilan mencerminkan keberlangsungan prinsip negara hukum (rechtsstaat). Implementasi kepatuhan terhadap hukum harus konsisten dan menyeluruh, tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, jabatan, atau afiliasi politik seseorang. Ketika aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga antikorupsi) melakukan tugasnya tanpa pandang bulu, maka masyarakat akan merasakan adanya keadilan substantif yang memperkuat rasa kepercayaan terhadap negara. Prinsip supremasi hukum atau rule of law menjadi landasan utama dalam penegakan hukum yang adil. Ini menuntut bahwa hukum berada di atas segala bentuk kekuasaan, bahkan pejabat tertinggi dalam negara sekalipun harus tunduk dan patuh pada hukum. Transparansi dalam proses penegakan hukum juga krusial, menjamin setiap tahapan proses dapat diawasi dan dinilai oleh publik. Penegakan hukum yang kuat memberikan efek jera dan menjadi sarana pendidikan hukum bagi masyarakat. Sistem penegakan hukum perlu dijalankan oleh aparat yang profesional, berintegritas, dan bebas dari intervensi politik. Reformasi lembaga hukum secara menyeluruh, pelatihan berkelanjutan, pengawasan internal dan eksternal, serta peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum adalah langkah strategis. Dalam masyarakat yang demokratis, penegakan hukum bukan sekadar instrumen pengendalian sosial, tetapi juga bagian dari pembangunan peradaban bangsa. Menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup⁹.

3. Pendidikan

Pendidikan memiliki peranan strategis dalam membentuk karakter dan kepribadian bangsa, khususnya dalam menanamkan nilai-nilai etika dan kepatuhan sejak usia dini. Pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi sarana transformatif untuk mencetak individu yang bermoral, bertanggung jawab, dan berkontribusi aktif. Oleh karena itu, pendidikan harus berorientasi pada penguatan karakter dan integritas moral. Integrasi pendidikan karakter ke dalam sistem kurikulum nasional menjadi langkah penting, mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial secara lintas disiplin. Pendidikan kewarganegaraan menekankan pemahaman hak dan kewajiban sebagai warga negara, membentuk individu yang sadar hukum dan patuh pada aturan. Pendidikan juga berperan membangun budaya toleransi dan empati. Keteladanan dari para pendidik dan lingkungan sekolah sangat dibutuhkan. Dalam era digital dan globalisasi, pendidikan perlu memperkuat literasi digital dan pemikiran kritis agar peserta didik mampu memilah informasi dengan bijak dan tetap berpegang pada nilai-nilai etika.

4. Masyarakat

Masyarakat memegang peran kunci dalam memastikan tegaknya etika dan kepatuhan

⁹ Fadhlil Ade Candra and Fadhillatu Jahra Sinaga, "Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 41–50, <https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15>.

dalam kehidupan bernegara. Masyarakat yang aktif, kritis, dan sadar hukum adalah fondasi penting bagi terciptanya tata kelola negara yang bersih, transparan, dan akuntabel. Partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada pemilu, tetapi juga mencakup keterlibatan berkelanjutan dalam berbagai proses pengambilan keputusan publik, pengawasan kebijakan, dan pemberdayaan sosial. Partisipasi aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan menjadi elemen penting dalam menjaga integritas pejabat publik dan institusi negara. Masyarakat yang sadar hukum mampu membedakan kebijakan yang adil dan diskriminatif, memiliki pengetahuan tentang hak-hak konstitusionalnya, dan memahami kewajibannya sebagai warga negara. Peran kolektif masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan (LSM, kelompok advokasi, komunitas relawan, organisasi keagamaan dan kemanusiaan) juga sangat penting. Media massa sebagai pilar keempat demokrasi juga berperan sebagai alat kontrol sosial yang efektif dan penyebar informasi yang objektif dan mendidik. Lembaga pengawas independen seperti KPK, Ombudsman, Komnas HAM, juga merupakan representasi masyarakat dalam mengawal etika dan kepatuhan di ranah publik. Ombudsman sebagai lembaga eksternal pengawas, dibentuk untuk menjadi kontrol dalam penyelenggaraan pelayanan publik¹⁰.

G. TANTANGAN DALAM PENERAPAN ETIKA DAN KEPATUHAN

Penerapan etika dan kepatuhan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan kompleks:

1. Korupsi

Korupsi menjadi permasalahan mendasar yang sangat mengganggu penerapan etika dan kepatuhan. Praktik korupsi yang meluas menunjukkan lemahnya integritas dan komitmen terhadap hukum. Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian finansial negara, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Fenomena korupsi sistemik memperlihatkan bahwa nilai-nilai moral dan etika belum menjadi pijakan utama dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas pejabat publik.

2. Degradasi Moral

Pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat memberikan tantangan besar terhadap pelestarian nilai-nilai moral. Arus informasi yang tidak tersaring dengan baik dapat mengakibatkan penyebaran budaya konsumtif, kekerasan, dan perilaku menyimpang. Fenomena ini berpotensi mengikis nilai-nilai etika yang selama ini menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Lemahnya pendidikan karakter juga memperburuk kondisi ini.

3. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Ketimpangan sosial dan ekonomi yang tajam menjadi tantangan signifikan dalam penerapan etika dan kepatuhan. Ketidakmerataan distribusi sumber daya dan kesempatan hidup yang adil menyebabkan munculnya rasa ketidakpuasan dan frustrasi. Ketimpangan ini tidak hanya memperlemah kohesi sosial, tetapi juga memicu berbagai bentuk pelanggaran hukum dan norma sosial sebagai bentuk protes atau akibat tekanan ekonomi. Saat ini ketimpangan sosial ekonomi menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam menyusun kebijakan publik¹¹.

¹⁰ Hendrikus Deo Peso and Edi Pranoto, "Fungsi Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik," *Jurnal JURISTIC* 3, no. 01 (2022): 59, <https://doi.org/10.35973/jrs.v3i01.2958>.

¹¹ Kamila Majazeta Yusrina et al., "Budaya Korupsi: Ketimpangan Sosial Ekonomi Antar Pejabat Negara Dan Masyarakat Akibat Pandemi," *Jurnal Sosial Dan Sains* 3, no. 12 (2024): 1328–37, <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v3i12.1158>.

4. Kurangnya Keteladanan dari Pemimpin

Keteladanan dari pemimpin merupakan salah satu faktor krusial dalam menumbuhkan budaya etika dan kepatuhan di masyarakat. Pemimpin yang berintegritas tinggi dan menunjukkan perilaku etis akan memberikan inspirasi dan motivasi. Sebaliknya, praktik-praktik korupsi, nepotisme, atau perilaku tidak etis lainnya dari pemimpin secara langsung melemahkan semangat dan komitmen masyarakat untuk patuh pada aturan dan norma. Ketidakberesan dalam perilaku para pemimpin menyebabkan krisis kepercayaan yang berdampak negatif terhadap stabilitas sosial dan efektivitas penegakan hukum.

H. SOLUSI UNTUK MEMPERKUAT ETIKA DAN KEPATUHAN

Menghadapi berbagai tantangan, diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif dan berkelanjutan:

1. Pendidikan Etika dan Karakter

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun kesadaran etika dan kepatuhan. Integrasi pendidikan etika dan pengembangan karakter harus menjadi bagian tak terpisahkan dari kurikulum di semua jenjang pendidikan. Pendidikan etika harus menanamkan nilai-nilai praktis seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, rasa hormat terhadap hukum, dan empati. Pendidikan ini juga perlu dirancang agar mampu menjawab tantangan zaman, terutama dalam menghadapi dampak negatif globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Di luar pendidikan formal, pendidikan non-formal seperti kegiatan ekstrakurikuler, pelatihan kepemimpinan, dan pembinaan di lingkungan masyarakat juga memiliki peran strategis. Peran keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama sangat penting dalam membentuk karakter anak sejak dini.

2. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi menjadi salah satu usaha pemerintah untuk mewujudkan sistem yang efisien¹². Reformasi ini kunci utama untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta profesionalisme aparatur negara. Reformasi birokrasi harus mencakup perbaikan sistem pengawasan internal yang ketat dan mekanisme pemberian sanksi yang jelas serta tegas terhadap pegawai negeri yang terbukti melakukan pelanggaran etika maupun hukum. Penerapan teknologi informasi, khususnya dalam bentuk sistem pelayanan publik berbasis elektronik atau e-government, memainkan peran sentral dalam reformasi birokrasi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam birokrasi juga merupakan bagian integral dari reformasi.

3. Penguatan Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang adil, transparan, dan konsisten merupakan salah satu pilar utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem kenegaraan dan menjaga ketertiban sosial. Keberadaan aparat penegak hukum yang profesional, mandiri, dan berintegritas menjadi sangat krusial. Penguatan lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menjadi prioritas. Pengawasan publik yang kuat dan keterbukaan informasi harus menjadi bagian integral dari proses penegakan hukum untuk menghindari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengembangan sistem peradilan yang cepat, transparan, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat juga penting.

4. Keteladanan dari Pemimpin

Pemimpin, baik di tingkat nasional maupun daerah, memiliki peranan yang sangat strategis dan menentukan dalam membentuk serta menguatkan budaya etika dan kepatuhan.

¹² Agusta Ari Wibowo and Indra Kertati, "Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik," *Public Service and Governance Journal* 3, no. 01 (2022): 01, <https://doi.org/10.56444/psgj.v3i01.2785>.

Pemimpin yang berintegritas tinggi, berkomitmen pada prinsip moral yang kokoh, dan konsisten dalam menerapkan nilai-nilai etika akan menjadi sumber inspirasi sekaligus panutan. Proses seleksi dan pengangkatan pemimpin harus didasarkan pada kriteria yang ketat, mencakup kompetensi moral, integritas, dan profesionalisme. Keteladanan pemimpin harus diwujudkan dalam komunikasi publik yang terbuka, jujur, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

KESIMPULAN

Etika dan kepatuhan adalah dasar utama dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis, tertib, dan beradab. Penerapan nilai-nilai etika dalam pemerintahan, penegakan hukum, pendidikan, dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk memperkuat integritas nasional dan mencegah penyimpangan sosial. Meskipun demikian, tantangan seperti korupsi, degradasi moral, dan kurangnya keteladanan pemimpin masih ada. Penanganan masalah ini memerlukan langkah konkret melalui pendidikan karakter, reformasi birokrasi, dan penegakan hukum yang adil serta konsisten. Peran semua elemen bangsa sangat penting: pendidikan menanamkan nilai moral, pemerintah menunjukkan keteladanan, dan partisipasi aktif masyarakat serta media menjadi kunci keberhasilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, Muhammad Mona, and Erwin Susanto. "Kekuatan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia." *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan* 15, no. 01 (2020): 121–38. <https://doi.org/10.37680/adabiya.v15i01.319>.
- Candra, Fadhlil Ade, and Fadhillatu Jahra Sinaga. "Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 41–50. <https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15>.
- Leo Arischa, Kennywan, and Aldri Frinaldi. "Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Dalam Penyajian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)." *Tanah Pilih* 3, no. 1 (2023): 11–18. <https://doi.org/10.30631/tpj.v3i1.1369>.
- Majazeta Yusrina, Kamila, Mutiara Maharani, Najmii Ula Aliffah, and Neiny Ratmaningsih. "Budaya Korupsi: Ketimpangan Sosial Ekonomi Antar Pejabat Negara Dan Masyarakat Akibat Pandemi." *Jurnal Sosial Dan Sains* 3, no. 12 (2024): 1328–37. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v3i12.1158>.
- Peso, Hendrikus Deo, and Edi Pranoto. "Fungsi Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik." *Jurnal JURISTIC* 3, no. 01 (2022): 59. <https://doi.org/10.35973/jrs.v3i01.2958>.
- Riyanto, Mochamad, and Vitalina Kovalenko. "Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2023): 374–88. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.374-388>.
- Rosidah, Idah, Gunardi, Priatna Kesumah, and Royke Bahagia Rizka. "Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey)." *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi : EMBA* 2, no. 1 (2023): 137–56. <https://doi.org/10.59820/emba.v2i1.110>.
- Saputri, Shipa Amalia Saputri, and Fatma Ulfatun Najicha. "Peran Penting Pancasila Sebagai Sistem Etika Dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 240–46. <https://doi.org/10.31571/jpkn.v7i2.7650>.
- Wibowo, Agusta Ari, and Indra Kertati. "Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik." *Public Service and Governance Journal* 3, no. 01 (2022): 01. <https://doi.org/10.56444/psgj.v3i01.2785>.